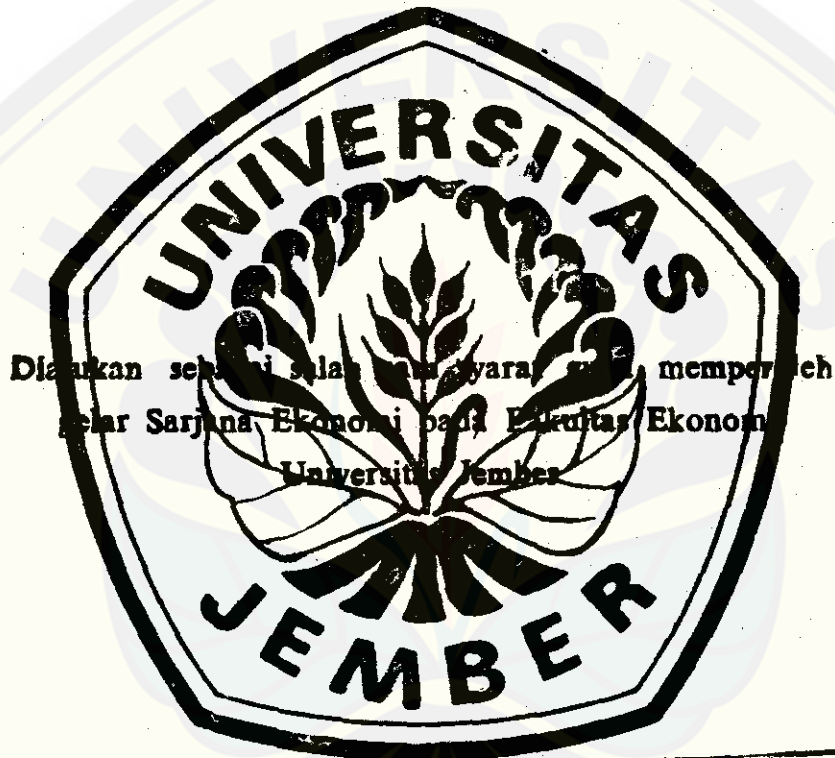




**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II DALAM KAITAN
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DI SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN VIII MADIUN TAHUN 1993/1996**

SKRIPSI



Oleh

Asal : Padiah
Pembelian
Terima Tgl: 11 SEP 2000
No. Induk : 10.2.2901

S
Klas
328.9
ROB
2

Lilis Robiatin
NIM. 960810101047/SP

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2000

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II DALAM KAITAN PENGEMBANGAN

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN VIII

MADIUN TAHUN 1993 - 1996

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Lilis Robiatin

N. I. M. : 960810101047

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

12 Agustus 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. J. Sugiarto, SU.

NIP. 130 610 494



Sekretaris,



Dra. Anifatul Hanim

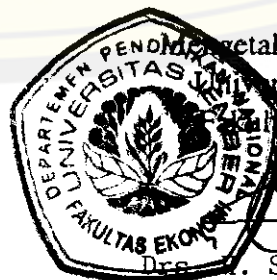
NIP. 131 953 240

Anggota,



Dra. Aminah

NIP. 130 676 291



Mengetahui/Menyetujui
Dekan,
Fakultas Ekonomi

Drs. W. Sukusni, M.Sc.

NIP. 130 350 764

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Kaitan
Pengembangan Perwilayahan Pembangunan di Satuan Wilayah
Pembangunan VIII Madiun Tahun 1993-1996

Nama Mahasiswa : Lilis Robiatin

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I

Dra. Aminah

NIP. 130 676 291

Pembimbing II

Drs. Rafael P.S. MS

NIP. 131 793 384

Ketua Jurusan

Dra. Aminah

NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 1 Agustus 2000



Karyaku kupersembahkan teruntuk :
Almamater Universitas Jember yang kubanggakan,
Bapak dan Ibunda Tercinta,
serta saudara-saudaraku tersayang,
calon suamiku kelak.

MOTTO :

“Pelajarilah Ilmu”

Maka mempelajarinya karena Allah ,itu Taqwa

Menuntutnya, itu Ibadah

Mengulang-ulangnya, itu Tasbih

Membahasnya, itu Jihad

Mengajarkan pada orang yang tidak tahu, itu Sedekah

Memberikan kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Tuhan

(Ihya' Al Ghozali, 1986)

Beriman, Bersabar dan Bertawakal kunci kemuliaan hatimu

Kegagalan kunci awal dari keberhasilan

Jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan baik

(LR'2000)

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di wilayah SWP VIII Madiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan ekonomi antar SWP, kesenjangan pendapatan antar SWP dan implementasi pembangunan terhadap pengembangan perwilayahan di SWP VIII Madiun.

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga penulisannya hanya menggambarkan kondisi wilayah dan permasalahannya serta rencana pengembangannya di masa depan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil pemrosesan dan pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis *shift share* dan Indeks Williamson. PDRB digunakan sebagai unit analisis, sehingga dalam penelitian ini sebagai populasi adalah besaran PDRB sedangkan unit waktu dipilih secara sengaja yaitu tahun 1993 sampai dengan 1996.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran total pertumbuhan ekonomi Dati II Madiun 40,44%, Kab.Ngawi -7,63%, Kab.Ponorogo -9,98%, Kab.Pacitan -20,26% dan Kab.Magetan -13,87%, sehingga Dati II Madiun tergolong daerah yang maju sedangkan kabupaten yang lain termasuk daerah yang lamban. Tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat dilihat dari nilai Indeks Williamson (Vw). Dari hasil perhitungan diperoleh Vw Dati II Madiun 0,6888, Kab.Magetan 0,65932, Kab.Ngawi 0,61171, Kab.Pacitan 0,59018 dan Kab.Ponorogo 0,58487. Jadi rata-rata tingkat kesenjangan pendapatan di SWP VIII Madiun sebesar 0,63418 termasuk besar dibandingkan tingkat kesenjangan Jawa Timur sebesar 0,13712, sehingga implementasi pembangunan ditekankan pada wilayah Madiun sebagai pusat pertumbuhan, dengan mengembangkan sektor industri untuk memberi peluang bagi para investor agar membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi SWP VIII Madiun.

Kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa prioritas pembangunan ditekankan pada daerah-daerah yang lamban dan kesenjangan pendapatannya besar. Selain itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan dan transportasi untuk menghubungkan daerah terbelakang dan terpencil, tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama Kab.Pacitan sangat berguna untuk menghubungkan antar kecamatan.

Kata kunci: PDRB, pendapatan antar wilayah, peranan pusat pertumbuhan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II DALAM KAITAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN VIII MADIUN TAHUN 1993-1996", dapat penulis selesaikan dengan mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dra.Aminah dan Bapak Drs.Rafael P.S, MS selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs.Sukusni, MSc selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta staf edukatif dan administratif.
3. Segenap pegawai Kantor Bappeda, Kantor Statistik Madiun dan Surabaya yang banyak memberikan data dan informasi yang sangat penulis butuhkan.
4. Bapak dan Ibu atas bantuan moril dan spirituil untuk kelancaran studi dan dorongannya selama ini.
5. Kakak-kakakku: Mbak End+Mas Pa't, Mas Ed+Mbak Nur, Mbak Tri'+Mas Yon serta special Mas Yos'l atas motivasi dan do'anya.

6. Rekan-rekan seperjuangan di ES-PE-GL'96 dan rekan-rekan konsentrasi ekonomi perencanaan dan industri khususnya atas kekompakannya.
7. Rekan-rekan di Jawa IV/15B dan di Jawa VI/19 atas keakraban dan persaudaraannya.
8. Rekan-rekan KKN kel. 14 atas kekompakannya
9. Sobatku Watiek, Eviek, Iis dan adikku Tiek's, thank's it all....
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan makna, manfaat dan berguna bagi semua pihak sebagai bahan informasi, Amien.

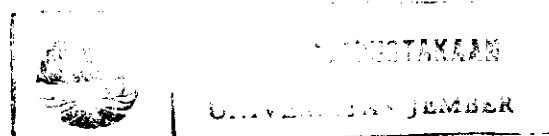
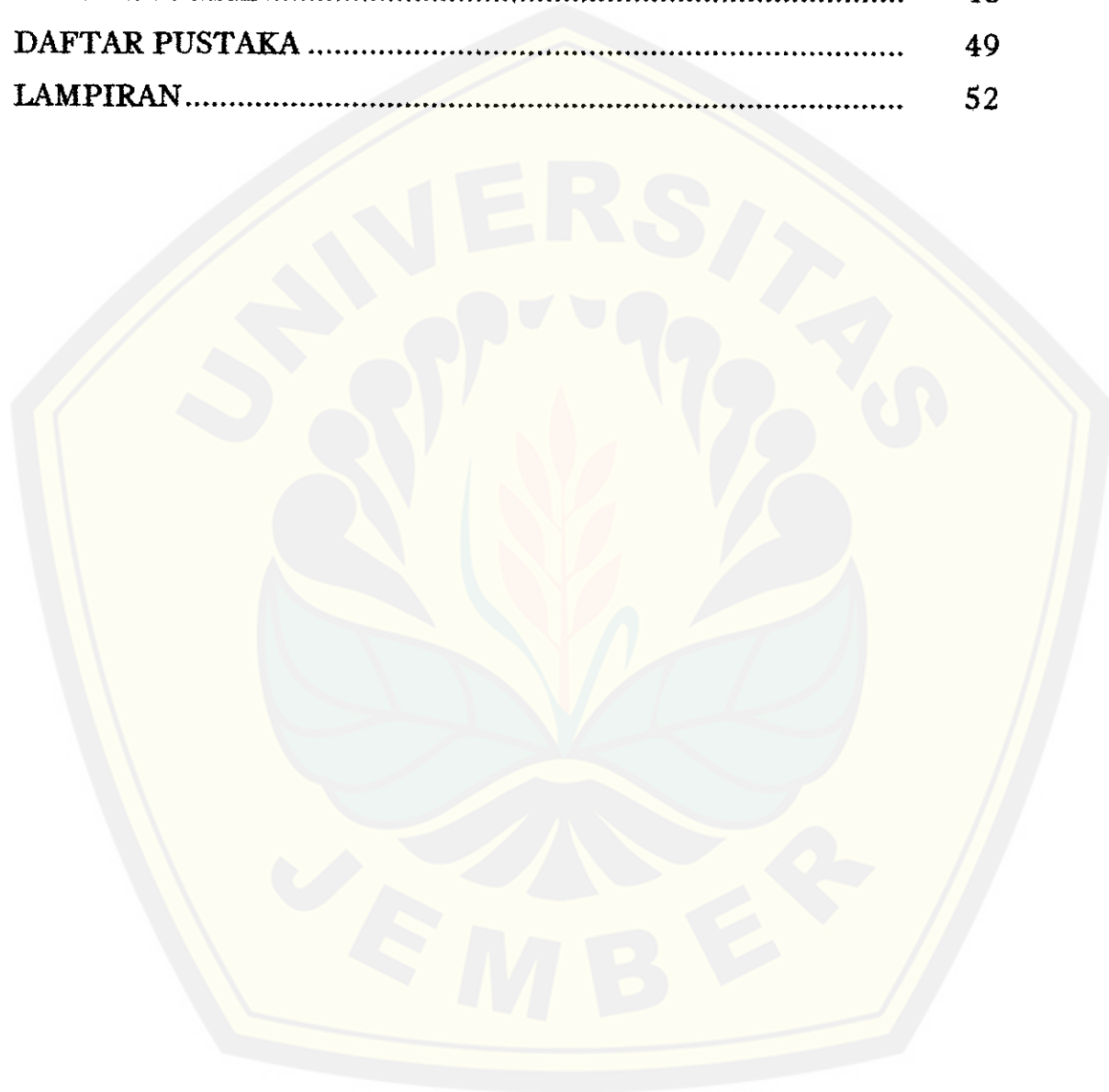
Jember, Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
2.2 Landasan Teori	9
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	17
3.2 Prosedur Pengumpulan Data	17
3.3 Metode Analisis Data.....	18
3.4 Terminologi	21
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum SWP Wilayah III Madiun.....	24
4.2 Analisis Data.....	37

4.3 Pembahasan	44
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52



11. Hasil Perhitungan Indeks Williamson antar SWP di SWP VIII Madiun Tahun 1996	39
--	----



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar wilayah dengan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat perlu memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan di seluruh daerah perlu ditingkatkan terutama dikawasan Timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya berdasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999:16).

Proses pembangunan ekonomi nasional akan efisien jika memenuhi tiga ciri pokok yaitu : (1) ekonomi ini mampu memproduksi output nasional sesuai dengan preferensi sosial yang ada secara optimal dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam suasana kompetisi yang sehat. (2) Tercapainya tingkat yang optimal dalam produksi barang dan jasa yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada. (3) Ekonomi ini dilandasi dengan kondisi-kondisi yang kukuh untuk melakukan ekspansi yang optimal pada masa-masa yang akan datang (Arief, 1998:55).

Paradigma pembangunan, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah merupakan tujuan utama. Ketidakmerataan ini akan menimbulkan kemajuan bagi daerah yang bersangkutan. Pemerataan pembangunan dibatasi oleh ketidakmerataan antar golongan penduduk, antar sektor dan antar daerah (Sumodiningrat, 1996:27). Pemahaman terhadap masalah ketidakmerataan antar golongan penduduk dapat dilakukan dengan melihat pergeseran distribusi pendapatan. Pemerataan pendapatan oleh kelompok penduduk akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi regional.

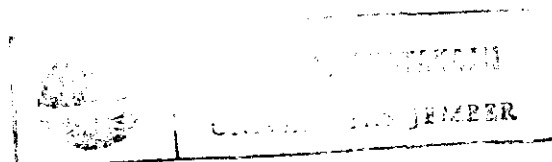
Kesenjangan antar golongan penduduk mempunyai kaitan erat dengan kesenjangan pengembangan antar sektor, terutama sektor ekonomi. Umumnya yang menjadi fenomena antara lain pengembangan sektor industri dan jasa. Diharapkan dengan pengembangan sektor ekonomi prioritas akan lebih meningkatkan aktivitas ekonomi (Sumodiningrat, 1996:27).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Ditekankan pada tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ada apabila terdapat lebih banyak output yang meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisien, yaitu adanya kenaikan output persatuan input. Perkembangan dan pembangunan ekonomi terjadi apabila tidak hanya terdapat kenaikan output persatuan input tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan tehnik dalam menghasilkan output yang lebih banyak (Irawan dan Suparmoko, 1995:6). Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dengan melihat seberapa besar produksi barang dan jasa yang dihasilkan melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto.

Analisis pertumbuhan antar wilayah menitikberatkan pada perpindahan faktor (*factor movements*). Adanya kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal sangat memperbesar keuangan bagi berbeda-bedanya tingkat pertumbuhan regional (Richardson, 1991:31).

Pembangunan yang telah dicapai Indonesia menghasilkan adanya daerah maju serta daerah yang pertumbuhannya lamban. Walaupun daerah yang bersangkutan berusaha untuk menerapkan kebijakan pembangunan wilayahnya agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah serta antar sektor terutama sektor ekonomi. Secara umum yang menjadi fenomena penyebab pokok terjadinya kesenjangan adalah adanya perbedaan dalam struktur industri atau struktur ekonomi (Budiharsono, 1989:68). Ketimpangan atau kesenjangan wilayah dapat dikurangi atau bahkan dapat diatasi melalui alokasi faktor-faktor produksi yang telah tumbuh dan meningkat, tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Diharapkan dengan pengembangan struktur ekonomi yang beragam akan menimbulkan perbedaan pertumbuhan output produksi dan kesempatan kerja. Sehingga ada daerah yang bertumbuh cepat, ini disebabkan struktur industri atau struktur ekonominya mendukung, dalam arti sebagian besar sektornya mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Bagi wilayah yang pertumbuhannya lamban, sebagian besar sektornya mempunyai laju pertumbuhan yang lamban (Budiharsono, 1989:35).

Berdasarkan alasan inilah strategi pembangunan daerah didasarkan pada konsep regionalisasi wilayah menurut Tjokrowinoto (1996:124) yaitu: upaya pengelompokan wilayah secara fungsional ke dalam wilayah-wilayah pembangunan besar dan kecil, berdasarkan keadaan geografi, topografi dan cuaca serta tingkat kesuburan tanah. Hal ini sejalan dengan pengelompokan propinsi-propinsi ke dalam wilayah-wilayah pembangunan, maka dalam



lingkungan masing-masing propinsi dapat pula beberapa kabupaten atau kotamadya berkelompok sebagai sub-provinsial region yang berbentuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Tujuannya meningkatkan kerjasama pembangunan antara kabupaten-kabupaten yang bertetangga, untuk mencapai hal-hal seperti pada perwilayahan pembangunan secara nasional.

Secara historis, Indonesia (tingkat nasional) telah melakukan berbagai eksperimen pengembangan kawasan. Pada tahun 1971, pemerintah melakukan regionalisasi wilayah negara menjadi empat Wilayah Pembangunan Utama, yaitu: WPU A dengan pusatnya di Medan, WPU B dengan pusatnya di Jakarta, WPU C dengan pusatnya di Surabaya, dan WPU D dengan pusatnya di Ujung Pandang. Keempat WPU ini terdapat sepuluh pusat wilayah pertumbuhan dan 87 sub-wilayah pembangunan (Tjokrowinoto, 1996:125).

Pengelompokan wilayah pembangunan dalam REPELITA IV menjadi enam Wilayah Pembangunan Utama dan 38 wilayah pengembangan, yaitu: WPU A pusatnya di Medan, WPU B pusatnya di Palembang, WPU C pusatnya di Jakarta, WPU D pusatnya di Surabaya, WPU E pusatnya di Ujung Pandang dan WPU F meliputi Maluku dan Irian Jaya tidak memiliki pusat pengembangan orde pertama. Perubahan ini bertujuan agar penentuan kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat lebih tepat, terarah dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah serta memudahkan penerapan konsep region dalam perumusan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan (Tjokrowinoto, 1996:125).

Pengelompokan wilayah di tingkat Propinsi dalam bentuk SWP, salah satunya Propinsi Jawa Timur. Perencanaan Pembangunan di Jawa Timur dilaksanakan oleh Bappeda Tingkat I Jawa Timur. Di Jawa Timur rencana pengembangannya meliputi sembilan SWP yaitu: SWP I Gerbangkertasusila,

SWP II Madura, SWP III Banyuwangi, SWP IV Jember dan daerah sekitarnya (DS), SWP V Probolinggo dan DS, SWP VI Malang dan DS, SWP VII Kediri dan DS, SWP VIII Madiun dan DS, dan SWP IX Tuban dan DS (Kantor Bappeda Jawa Timur, 1990a:35).

Dilihat dari sisi spasial PDRB tiap SWP tampak pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 per SWP di Jawa Timur Tahun 1996

No	SWP	Jumlah (rupiah)	Persentase
1	I	26.511.534,96	42,90
2	II	2.096.667,41	3,39
3	III	1.878.409,56	3,03
4	IV	3.326.227,52	5,38
5	V	2.894.892,96	4,68
6	VI	7.973.574,96	12,90
7	VII	11.046.080,21	17,87
8	VIII	3.429.125,26	5,43
9	IX	2.708.793,72	4,38
Total		61.752.469,56	100

Sumber data : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1997b, Mei 2000

Berdasarkan tabel 1 peranan sumbangan PDRB tiap Satuan Wilayah Pembangunan pada tahun 1996 atas dasar harga konstan 1993 SWP I sebesar 42,90%, SWP II 3,39%, SWP III 3,03%, SWP IV 5,38%, SWP V 4,68%, SWP VI 12,90%, SWP VII 17,87%, SWP VIII 5,43% dan SWP IX 4,38%. Dari sini dapat diketahui di Jawa Timur peranan sumbangan antar SWP senjang dan kecil. Salah satunya SWP VIII Madiun, sehingga perlu dibahas dalam penelitian ini.

Dilihat dari perekonomiannya SWP VIII Madiun dalam pengembangan struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 35,99%, sektor pertambangan dan galian

2. berapa besar tingkat kesenjangan pendapatan antar SWP di SWP VIII Madiun;
3. bagaimana implementasi pembangunan terhadap pengembangan perwilayahan di SWP VIII Madiun sehingga dapat memberikan daya dukung pembangunan terhadap perekonomian pada wilayah-wilayah sekitarnya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. kontribusi pertumbuhan ekonomi antar Satuan Wilayah Pembangunan di SWP VIII Madiun;
2. kesenjangan pendapatan antar Satuan Wilayah Pembangunan di SWP VIII Madiun;
3. implementasi pembangunan terhadap pengembangan perwilayahan di SWP VIII Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. masukan atau informasi serta sumbangan pemikiran bagi instansi-instansi yang terkait dalam menentukan kebijaksanaan;
2. masukan bagi peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang sama sudah pernah dilakukan oleh:

Kristanto (1998) yang berjudul "Analisis Pertumbuhan Antar Wilayah di Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Dati II Jember" hasilnya sebagai berikut :

1. Selama kurun waktu 1993-1996 antar pusat pertumbuhan dan daerah belakang pada setiap SSWP pertumbuhan ekonomi di daerah belakang lebih maju dibandingkan pusat pertumbuhannya, yaitu Kecamatan Sumpalsari, Arjasa, Sukowono, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, Silo, Mumbulsari, Rambipuji, Sukorambi, Panti, Bangsalsari, Sumberbaru, Balung, Wuluhan, Puger, Gumukmas, Umbulsari dan Jelbuk. Daerah yang lamban pertumbuhannya didominasi oleh daerah sebagai pusat pertumbuhan, antara lain Kaliwates, Patrang, Pakusari, Temporejo, Jenggawah, Tanggul, Ambulu, dan Kencong. Hanya SSWP kabupaten Jember bagian Utara/Timur dengan pusat pertumbuhan Kalisat, SSWP Kabupaten Daerah Tingkat II Jember bagian Barat /Selatan dengan pusat pertumbuhan Balung yang maju pertumbuhan ekonominya.
2. Selama kurun waktu 1993-1996 pusat pertumbuhan tiap SSWP yang mempunyai Indeks Williamson besar yaitu SSWP Kabupaten Daerah Tingkat II Bagian Tengah (Kaliwates) 24,086, SSWP Kabupaten Jember bagian Utara/Timur (Kalisat) 12,811, SSWP Kabupaten Jember bagian Barat/Utara (Tanggul) 12,694, dan SSWP Kabupaten Jember bagian Barat/Selatan 6,936, artinya tingkat kesenjangan pendapatan di Kaliwates semakin besar. Tingkat kesenjangan terkecil yaitu di daerah Balung. SSWP kabupaten Jember bagian Utara/Timur (Kalisat), artinya kesenjangan antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakang besar.

Pusat pertumbuhan di setiap SSWP jumlah Indeks Williamson kecil yaitu SSWP Kabupaten Jember bagian Barat/Utara dan SSWP kabupaten Jember bagian Barat/Selatan, artinya kesenjangan pendapatan antar pusat pertumbuhan dengan daerah belakang adalah kecil.

Putra (1997) dengan judul “Pengembangan Sektor Ekonomi Guna Peningkatan Sumbangan terhadap PDRB Kotamadya Dati II Pasuruan” hasilnya sebagai berikut : sembilan sektor ekonomi di Kotamadya Dati II Pasuruan terjadi pergeseran total pertumbuhan antar sektor yang disebabkan oleh komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah, semakin negatif nilai persentase dari kedua komponen tersebut berarti semakin besar pergeseran total yang terjadi.

Kedua penelitian tersebut menggunakan konsepsi teori *growth poles* dan model pertumbuhan ekonomi wilayah regional (analisis *shift share* dan *Indeks Williamson*) serta menggunakan metode studi literatur dengan mengambil data dari instansi terkait (BPS dan Bappeda) untuk digunakan referensi bagi penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan tidak hanya merupakan lokalisasi dari industri-industri inti. Pusat pertumbuhan harus juga mendorong ekspansi yang besar di daerah sekitar, karenanya efek polarisasi strategik adalah lebih menentukan daripada perkaitan-perkaitannya antar industri. Prasarana yang sudah sangat berkembang, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral, permintaan terhadap faktor-faktor produksi dari daerah pengaruh dan persebaran kesadaran pertumbuhan serta dinamisme ke seluruh daerah pengaruh, kesemuanya ini penting untuk mendorong polarisasi (Richardson, 1991:85).

Menurut Perraoux (dalam Glasson, 1990:170), (1) pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi serentak; (2) pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah; (3) pertumbuhan menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Menurut teori ini daerah yang akan tumbuh cepat adalah daerah yang merupakan pusat pertumbuhan atau pengembangan, sedangkan daerah lainnya akan tetap jauh tertinggal dalam segala bidang.

Boudenville (dalam Glasson, 1990:170), mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya.

Gunnar Myrdall (dalam Nuryasman, 1996:243), mengemukakan bahwa tempat-tempat yang akan menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian sehingga daerah ini memiliki keuntungan komparatif dibandingkan daerah lainnya. Myrdall menekankan analisisnya pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan di berbagai daerah yaitu timbulnya *backwash effects* dan *spread effects*. Daerah yang maju akan berkembang lebih cepat daripada daerah yang kurang maju karena faktor-faktor yang menimbulkan *spread effects* ke daerah yang lebih miskin.

Konsep dasar teori kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai berikut (Nuryasman, 1996:243):

1. konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan *propulsif*, menyatakan pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan yang *propulsif* dan besar yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit ekonomi lainnya.

2. konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan.
3. konsep *spread effects* menyatakan bahwa pada waktu kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki ruang sekitarnya. *Spread effects* dikenal juga dengan *trickle down effects*.

2.2.2 Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah

Kehidupan bangsa pada dasarnya selalu berkembang, untuk itu perlu dijamin berlangsungnya pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan suatu bangsa menuntut diterapkannya pola-pola efisiensi pada segenap kegiatan usaha, baik yang tergolong dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Konsep pengembangan wilayah nasional menuntut diterapkannya tujuan-tujuan : (1) mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (2) memperkuat kesatuan ekonomi nasional; dan (3) memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan berkelakuan searah sesuai dengan konsep pengembangan wilayah (Hadjisaroso, 1990:2).

Konsep pengembangan wilayah memerlukan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi serta merata mendorong suatu daerah untuk memperkuat kesatuan ekonomi nasional. Keseimbangan antar daerah akan memperkuat ekonomi nasional, secara tidak langsung akan terpelihara pertumbuhan nasional yang efisien (Hadjisaroso, 1990:2).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam konsep pengembangan wilayah dapat ditingkatkan dengan pemilihan lokasi yang di nilai paling menguntungkan antara yang menghasilkan barang atau jasa, hal ini tidak mengurangi kecenderungan untuk tetap berkelompok, mengingat bahwa (a)

berkelompoknya kegiatan usaha tetap merupakan langkah yang menguntungkan, dan (b) kegiatan usaha penghasil jasa mudah menyesuaikan diri, sehubungan dengan ciri-ciri pelayanannya, yaitu yang berjangkauan lokal maupun berorientasi kedalam saja (Hadjisaroso, 1990:4).

Konsep Pengembangan Wilayah Regional mendefinisikan suatu wilayah, yaitu sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada umumnya dan tentu batasnya. Untuk lebih menyederhanakan pengertian wilayah, dibagi wilayah nasional dan wilayah daerah regional. Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara. Daerah regional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah batas propinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan dan desa. Wilayah Nasional terbagi dalam daerah-daerah, dalam pelaksanaannya menerapkan kebijaksanaan nasional melalui proses pengaturan pemerintah daerah regional (Hadjisaroso, 1990:8).

Realisasi dari kebijaksanaan pembangunan tersebut dibentuklah wilayah-wilayah pembangunan (SWP) yang dikelompokkan berdasarkan perbatasan daerah, dengan memperhatikan pengaruh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi akan digantikan pengaruh dari pusat lainnya. Satuan Wilayah Pembangunan merupakan berbagai jenis kegiatan yang tercakup dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dan pelaksanaannya diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek pengembangan antar sektor, pada satu atau lebih daerah dalam satu wilayah pembangunan. SWP ini dibagi dalam Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) yang menghubungkan beberapa daerah untuk membentuk kegiatan hubungan tiap sektor ekonomi. Dengan adanya SSWP diharapkan tingkat pertumbuhan antar wilayah pembangunan dapat ditingkatkan (Sukirno, 1982:2).

dari tingkat produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.

Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya timbul dan bertambah besar. Pengertian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Menekankan pada tiga aspek yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang (Irawan dan Suparmoko, 1995:6). Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik apabila terdapat lebih banyak output yang meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisien. Pertumbuhan ekonomi ada apabila tidak hanya terdapat kenaikan output persatuan input tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan tehnik dalam menghasilkan output yang lebih banyak.

Kuznets (dalam Jhingan, 1988:5) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan untuk menyediakan semakin banyak jenis barang kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan.

2.2.4 Model Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Regional

2.2.4.1 Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* ini menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu. Analisis ini mengasumsikan bahwa perubahan produksi pada suatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi tiga komponen pertumbuhan, yaitu: komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) (Supomo, 1993:44).

Penjelasan dari ketiga komponen pertumbuhan tersebut adalah (Budiharsono, 1989:71):

1. komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan ekonomi nasional, atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah;
2. komponen pertumbuhan proporsional timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar;
3. komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena perbandingan peningkatan atau penurunan PDRB dalam suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Cepat atau lambat pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan regional pada wilayah tersebut.

2.2.4.2 Indeks Williamson

Membahas kesenjangan antar wilayah ada dua teori yang perlu diperhatikan, yaitu (Budiharsono, 1989:72):

1. *generative growth theory* menyatakan bahwa pada saat perekonomian nasional bertumbuh mantap, banyak persoalan ekonomi yang dapat diselesaikan. Beberapa wilayah tumbuh lebih cepat daripada wilayah lainnya, masalah distribusi dan redistribusi menjadi tidak terlalu penting. Kata lain, laju pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi wilayah terbelakang ditingkatkan;

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, sehingga dalam penulisan hanya menggambarkan kondisi wilayah dan permasalahan serta rencana pengembangan di masa depan, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil pemrosesan dan pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis *shift share* dan Indeks Williamson.

Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai unit analisis, sehingga dalam penelitian ini sebagai populasi adalah besaran PDRB, sedangkan unit waktu dipilih secara sengaja yaitu tahun 1993 sampai dengan tahun 1996.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu sumber-sumber data yang diperoleh dari instansi yang terkait, antara lain adalah: Kantor statistik Madiun, Kantor BAPPEDA Madiun, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), serta studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alasan pemilihan tahun 1993 sebagai tahun dasar adalah. (Kantor Statistik Kotamadya Madiun, 1997a:5): (1) tahun dasar yang direkomendasikan oleh PBB; (2) interval sepuluh tahun merupakan kurun waktu yang secara umum juga dipraktekkan negara lain; (3) kondisi sosial ekonomi di Indonesia pada tahun 1993 menunjukkan keadaan stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya; (4) merupakan tahun akhir pelaksanaan PJP I dan awal pelaksanaan PJP II sehingga tahun tersebut dapat digunakan sebagai basis pembanding bagi perkembangan ekonomi tahun-tahun yang lain dalam PELITA; (5) data statistik yang tersedia

semakin sempurna dan tingkat konsistensinya lebih baik.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan ekonomi antar SWP di SWP VIII Madiun

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diketahui dengan cara membandingkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, maka digunakan analisis *shift share* (Supomo, 1993:44). Secara matematis dirumuskan sebagai berikut (Budiharsono, 1989:72):

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Rumus matematis tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y'_{ij} - Y_{ij} = \Delta Y_{ij} = Y_{ij} (R_a - 1) + Y_{ij} (R_i - R_a) + Y_{ij} (r_i - R_i)$$

dimana :

dalam suatu negara terdapat m daerah atau wilayah dan n sektor ekonomi

j = wilayah tertentu (=1,2,3,...m), misal Kodya Madiun, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Ponorogo, Kab.Pacitan.

i = sektor ekonomi yang terdiri sembilan sektor dibagi dalam tiga sektor utama, yaitu primer, sekunder dan tersier(= 1,2,3,...n).

ΔY_{ij} = Perubahan dalam produksi atau PDRB sektor i pada wilayah ke j

Y_{ij} = Produksi atau PDRB dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.

Y'_{ij} = Produksi atau PDRB dari sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis

$Y_i = \sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = PDRB (daerah kotamadya atau kabupaten) dari sektor i pada tahun dasar analisis

$$Y'_i = \sum_{j=1}^m Y'_{ij} = \text{PDRB (daerah kotamadya atau kabupaten) dari sektor } i \text{ pada tahun akhir analisis}$$

$$Y_{..} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij} = \text{PDRB (SWP VIII Madiun) pada tahun dasar analisis}$$

$$Y'_{..} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y'_{ij} = \text{PDRB (SWP VIII Madiun) pada tahun akhir analisis}$$

$$r_i = \frac{Y'_{ij}}{Y_{ij}} \quad R_i = \frac{Y'_i}{Y_i} \quad R_a = \frac{Y'_{..}}{Y_{..}}$$

$(r_i - 1)$ = Persentase perubahan PDRB di sektor i wilayah ke j

$(R_a - 1) = PN_{ij}$ = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional (SWP VIII Madiun)

$(R_i - R_a) = PP_{ij}$ = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional

$(r_i - R_i) = PPW_{ij}$ = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah

Dari penjumlahan dua komponen pertumbuhan wilayah, yaitu komponen pertumbuhan proporsional dan pertumbuhan pangsa wilayah dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah. Jumlah antara kedua komponen tersebut diatas disebut pergeseran total (PT), yang dinyatakan sebagai berikut :

$$PT_j = PP_{ij} + PPW_{ij}$$

dimana :

PT_j = pergeseran total sektor i pada wilayah j

Apabila $PT_j > 0$, maka pertumbuhan wilayah j termasuk ke dalam kelompok maju. Sedangkan apabila $PT_j < 0$ maka pertumbuhan wilayah j termasuk lamban.

3.3.2 Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan antar SWP di SWP VIII Madiun

Hal ini berarti adanya kesenjangan antar wilayah di SWP VIII Madiun digunakan rumus Indeks Willamson (Budiharsono, 1989:82):

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_j - \bar{Y})^2 \times \frac{f_j}{n}}{\bar{Y}}}$$

dimana :

- V_w = Indeks Williamson
- f_j = Populasi di wilayah ke j
- Y_j = Pendapatan perkapita di wilayah ke j
- n = Populasi total
- $\bar{Y}$ = Pendapatan rata-rata

Ketentuannya sebagai berikut :

1. nilai Indeks Williamson antara 0-1
2. jika nilai Indeks Williamson mendekati 1 berarti kesenjangan pendapatan di SWP VIII semakin besar dan sebaliknya semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin kecil
3. jika nilai Indeks Williamson wilayah SWP VIII lebih besar dari Indeks Williamson Jawa Timur berarti kesenjangan pendapatan di SWP VIII lebih besar dari kesenjangan pendapatan di Jawa Timur dan sebaliknya

Indeks Williamson ini untuk mengetahui besar kecilnya kesenjangan ekonomi antar wilayah, sehingga dapat diketahui keadaan wilayah dalam mengembangkan ekonominya untuk mencapai kemajuan dan pemerataan pembangunan. Indeks ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Indeks Williamson maka proses kesenjangan daerah tersebut semakin besar.

4. Perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Perwilayahan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia bertujuan pemerataan pembangunan sehingga dapat dihindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebih-lebihan di suatu daerah tertentu.
5. Pembangunan meliputi unsur-unsur perencanaan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial serta ditunjang oleh kemajuan teknologi dan dalam pelaksanaannya hendaknya juga memperhitungkan aspek perwilayahan.
6. Satuan Wilayah Pembangunan VIII Madiun meliputi bagian dari suatu daerah atau mencakup bagian-bagian dari beberapa daerah, berikut wilayah pengaruhnya. Kota-kota lain yang berada dalam pengaruhnya adalah Kab.Ponorogo, Kab.Pacitan, Kab.Ngawi, Kab.Magetan sebagai daerah sub ordinasinya.
7. Sektor ekonomi di SWP VIII Madiun adalah : a) pertanian; b) pertambangan dan penggalian; c) industri pengolahan; d) listrik,gas dan air bersih; e) bangunan; f) perdagangan,hotel dan restoran; g) pengangkutan; h) keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; i.jasa-jasa. Dari sembilan sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi :
sektor primer : a) pertanian; b) pertambangan dan penggalian
sektor sekunder: c) industri pengolahan; d) listrik,gas dan air bersih;
e)bangunan
sektor tersier : f) perdagangan, hotel dan restoran; g) pengangkutan;
h)keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; i.jasa-jasa.
Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan dalam analisis *shift share*.
8. Analisis *shift share* untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi antar SWP di SWP VIII Madiun termasuk kelompok maju atau lamban.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum SWP Wilayah VIII Madiun

4.1.1 Keadaan Geografis

SWP VIII merupakan salah satu SWP di wilayah pembangunan VI Jawa Timur dengan luas wilayah keseluruhan sebesar $5.734,43 \text{ km}^2$. Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah terluas sebesar $1.371,78 \text{ km}^2$, kemudian disusul Kabupaten Pacitan $1.311,88 \text{ km}^2$, Kabupaten Ngawi $1.295,98 \text{ km}^2$, Kabupaten Madiun $1.010,86 \text{ km}^2$, Kabupaten Magetan $688,85 \text{ km}^2$ dan Kotamadya Madiun $55,08 \text{ km}^2$.

SWP VIII memiliki batas-batas yaitu: sebelah Utara Kabupaten Bojonegoro, sebelah Selatan Samudra Indonesia, sebelah Barat Kabupaten Sragen dan Karanganyar (Jawa Tengah), dan sebelah Timur Kabupaten Nganjuk.

SWP VIII Madiun merupakan suatu satuan wilayah di Jawa Timur yang meliputi lima kota, yaitu: Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi. SWP Madiun terdiri dari enam daerah tingkat II (lima Kabupaten, satu Kotamadya), 75 Kecamatan dan 1152 Desa. Berdasarkan potensi dan keadaan alam serta upaya menyelaraskan pertumbuhan antar wilayah di SWP Madiun, maka masing-masing kabupaten dalam SWP ini dibagi menjadi beberapa perwilayahan, atau sesuai dengan arahan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun VI Daerah (REPELITADA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1994/1995-1998/1999 (Kantor Bappeda Jawa Timur, 1990b:18).

Kotamadya Madiun dibagi dalam tiga perwilayahan pembangunan, yaitu :

1. Sub Satuan Wilayah Pembangunan Taman meliputi kelurahan-kelurahan yang ada dalam kecamatan tersebut. Kegiatan utama dalam SWP ini adalah pemukiman dan perdagangan.
2. Sub SWP Mangunharjo dengan kegiatan utama perdagangan dan Industri.
3. Sub SWP Kertoharjo dengan kegiatan utama pada perdagangan, perkantoran dan pendidikan.

Kabupaten Madiun dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan yaitu :

1. SSWP I dengan pusat di Kecamatan Mejayan yang meliputi Kecamatan Mejayan, Balerejo, Pilangkenceng, Caruban, Saradan dan Gemarang. Pengembangannya diarahkan pada kegiatan perdagangan, pertanian, industri, pendidikan, perhubungan, pariwisata dan lingkungan hidup.
2. SSWP II berpusat di Kecamatan Wungu (Dungus) dan beberapa kecamatan yang termasuk di dalam SSWP II antara lain, Kecamatan Jiwan, Nglames dan Kare. Kegiatan yang dicanangkan adalah: perdagangan, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan hidup.
3. SSWP III berpusat di Kecamatan Dolopo, meliputi Kecamatan Dolopo, Dagangan dan Kebonsari. Kegiatannya diarahkan pada perdagangan, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan hidup.

Kabupaten Tingkat II Ngawi di bagi menjadi empat SSWP, yaitu :

1. SSWP Timur Kali Madiun yang berpusat di Kecamatan Karangjati, meliputi Kecamatan Padas Pangkur, Bringin dan Karangjati. Kegiatan yang diarahkan pertanian, perkebunan dan perindustrian dibidang pengelolaan tembakau, ketela pohon, gula rakyat dan pengolahan batu gamping.

5. SSWP yang berpusat di Kecamatan Maospati meliputi Kecamatan Maospati, Bendo dan Sukomoro. Pengembangannya diarahkan pada perdagangan dan industri serta penyanggahan sistem keamanan pertahanan TNI- AU Iswahyudi (daerah militer).

Kabupaten Ponorogo terbagi dalam lima SSWP, yaitu :

1. SSWP I yang berpusat di kecamatan kota meliputi Kecamatan kota Babadan, Jenangan dan Siman. Kegiatan utamanya perdagangan, pertanian tanaman pangan, perkebunan (tebu), pendidikan dan industri.
2. SSWP II yang berpusat di Kecamatan Kauman meliputi Kecamatan Kauman, Sukorejo, Badegan dan Sampung. Kegiatan utamanya pertanian tanaman pangan, peternakan, hasil hutan, bahan galian dan batu kapur.
3. SSWP III yang berpusat di Kecamatan Slahung meliputi Kecamatan Slahung, Balong, Bungkal dan Ngrayun. Kegiatan utamanya pertanian tanaman pangan, hasil hutan, bahan galian dan perkebunan.
4. SSWP IV yang berpusat di Kecamatan Jetis meliputi Kecamatan Jetis, Sambit, Mlarak dan Sawo. Kegiatan utamanya pertanian tanaman pangan, peternakan, industri kecil dan hasil hutan
5. SSWP V yang berpusat di Kecamatan Pulung meliputi Kecamatan Pulung, Sooko dan Ngebel. Kegiatan utamanya pertanian tanaman pangan, perkebunan, buah-buahan, perikanan, bahan galian, hasil hutan dan industri kecil.

Kabupaten Pacitan terdapat empat SSWP, yaitu :

1. SSWP bagian Barat yang berpusat di Kecamatan Punung meliputi Kecamatan Punung, Donorojo dan Pringkulu. Kegiatan utamanya pertambangan, industri kerajinan dan pariwisata

dengan lereng-lereng yang terjal. Untuk pengamanan daerah ini harus dipertahankan sebagai hutan lindung, karena daerah ini berfungsi sebagai hidrologis.

Berdasarkan kriteria tempat di atas permukaan laut (dpl) ini dapat dijadikan faktor untuk menentukan jenis kegiatan dan penggunaan tanah di SWP VIII Madiun.

Gambaran secara jelas tentang penggunaan tanah di wilayah SWP Madiun dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penggunaan Tanah Menurut Kabupaten atau Kotamadya di SWP VIII Madiun Tahun 1996

Kabupaten	Pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman		Tegal, kebun ladang, huma		lahan penggembalaan padang rumput		Kolam tebat Empang	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Pacitan	23674	23	75925	53	49	77	12	24
Ponorogo	24697	24	33265	23	-	-	-	-
Dati II Madiun	18263	18	7603	5	-	-	14	29
Magetan	15874	16	11487	8	-	-	-	-
Ngawi	18550	18	14821	10	15	23	23	47
Jumlah	101.058	100	143.101	100	64	100	49	100

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1997a, Mei 2000

note: * termasuk kotamadya dan kabupaten

Berdasarkan tabel 2 posisi terbesar penggunaan tanah untuk pekarangan, bangunan dan halaman ditempati oleh Kab.Ponorogo (24697 ha) atau 24%, dan untuk tanah, tegal, kebun atau ladang, huma oleh Kab.Pacitan (75925 ha) atau 53%. Demikian juga tanah untuk lahan penggembalaan dan padang rumput, Kab.Pacitan berada posisi teratas (49 ha) atau 77%. Terakhir untuk tanah kolam tebat atau empang posisi teratas ditempati oleh Kab.Ngawi (23 ha) atau 47%, seiring dengan lokasi Kab.Ngawi yang berada diantara aliran sungai Bangawan Solo dan daerah kawasan hutan lindung.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan faktor penggerak pembangunan sekaligus dapat menjadipenghambat pembangunan bila perkembangan penduduk tidak terkendali. Hal tersebut menyebabkan masalah penduduk menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pula dalam pembangunan daerah. Jumlah penduduk akhir tahun di SWP VIII terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Kabupaten atau Kotamadya di SWP VIII Tahun 1996 (dalam jiwa)

No	SSWP	Jumlah	Persentase
1	Dati II Madiun	832.455	22,18
2	Kabupaten Ngawi	843.410	22,47
3	Kabupaten Ponorogo	875.712	23,33
4	Kabupaten Pacitan	526.871	14,04
5	Kabupaten Magetan	674.367	17,97
	Total	3.752.815	100

Sumber data : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1997a, Mei 2000

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa jumlah penduduk pada akhir tahun 1996 di SWP VIII sebesar 3.752.815 jiwa. Jumlah penduduk Dati II Madiun sebesar 832.455 jiwa atau 22,18%, Kabupaten Ngawi 843.410 jiwa atau 22,47%, Kabupaten Ponorogo 875.712 jiwa atau 23,33%, Kabupaten Pacitan 526.871 jiwa atau 14,04% dan Kabupaten Magetan 674.367 jiwa atau 17,97%.

Tabel 4. Tingkat Kepadatan Penduduk Akhir Tahun Menurut Kabupaten atau Kotamadya di SWP VIII Tahun 1996

No	SSWP	Luas Area (km^2)	Kepadatan penduduk (jiwa)
1	Dati II Madiun	1.065,94	3521
2	Kabupaten Ngawi	1.295,98	651
3	Kabupaten Ponorogo	1.371,78	638
4	Kabupaten Pacitan	1.311,88	402
5	Kabupaten Magetan	688,85	979

Sumber data : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1997a, Mei 2000

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan SSWP yang memiliki wilayah terluas yaitu sebesar $1.371,78 km^2$, tetapi tingkat kepadatan penduduknya sebesar 638 jiwa. Sebaliknya Dati II Madiun memiliki wilayah tersempit sebesar $1.065,94 km^2$ dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 3.521 jiwa, ini berarti Dati II Madiun merupakan kota tujuan urbanisasi.

Jumlah penduduk menurut angkatan kerja dapat dilihat pada tabel 5. Jumlah angkatan kerja di SWP VIII Madiun sebanyak 1.777.601 jiwa. Dari jumlah tersebut yang bekerja pada sektor primer 61,42%, sektor sekunder 11,40% dan sektor tersier sebesar 27,18%. Dilihat lebih jauh jumlah pekerja pada sektor primer yang paling sedikit adalah Dati II Madiun sebesar 44,84% dan yang terbanyak adalah Kab.Pacitan 79,08%, sedangkan untuk sektor sekunder yang terkecil adalah Kab.Pacitan 7,82% dan terbanyak Dati II Madiun sebesar 14,33%. Terakhir untuk sektor tersier terkecil adalah Kab.Pacitan 13,10% dan terbanyak Dati II Madiun sebesar 40,83%. Hal ini tergantung potensi masing-masing wilayah.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di SWP VIII Madiun Tahun 1996

SSWP	Primer		Sekunder		Tersier		Total	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
Madiun*	158.152	44,48	50.535	14,33	144.025	40,83	352.712	100
Pacitan	220.676	79,08	21.826	7,82	36.569	13,10	279.071	100
Ponorogo	276.989	65,12	45.445	10,68	102.941	24,20	425.375	100
Magetan	194.046	57,59	41.805	12,41	101.096	30,00	336.947	100
Ngawi	241.950	63,09	43.061	11,23	98.485	25,68	383.496	100
SWP VIII	1.091.813	61,42	202.672	11,40	483.116	27,18	1.777.601	100

Sumber : Lampiran 2, diolah

note : * termasuk kotamadya dan kabupaten

4.1.3 Perekonomian SWP VIII Madiun

Tingkat perkembangan daerah sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan daerah yang menguasai SWP yang bersangkutan (Hadjisaroso, 1990:11). Penyatuan beberapa daerah dalam SWP VIII didasarkan pada suatu mekanisme pengembangan wilayah yang bertumpu pada sistem daerah nodal atau simpul-simpul daerah yang tercipta melalui daerah-daerah tersebut dalam mendistribusikan barang dan jasa.

Berdasarkan Keputusan Daerah Tingkat I Jawa Timur no.34 tahun 1984 ditetapkan bahwa kotamadya Madiun sebagai pusat pertumbuhan bagi sub-sub SWP VIII yaitu: Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan. Kotamadya Madiun sebagai pusat pertumbuhan pada SWP VIII memiliki peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan SWP VIII.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan akan dapat mencapai sasaran bila kegiatan pembangunan diarahkan pada: (a) perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bidang usaha (pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata); (b) pengendalian jumlah penduduk melalui keluarga berencana, transmigrasi, pelayanan kesehatan dan penunjang lainnya; (c)

memacu sektor-sektor usaha yang banyak berperan di daerah yaitu pertanian, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan perhubungan. Kegiatan pembangunan SWP VIII secara keseluruhan tercermin pada indikator sebagai berikut :

4.1.3.1 Pendapatan Perkapita

Hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat dapat terlihat dari tingkat pendapatan perkapita yang dihitung tiap tahun dalam satu periode. Pendapatan perkapita digunakan sebagai tolok ukur bagi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat meskipun masih belum dapat mencerminkan adanya perolehan pendapatan yang sebenarnya yang diterima oleh masyarakat. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita di SWP VIII dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Kabupaten dan Kotamadya di SWP VIII Tahun 1996

No	SSWP	Jumlah (rupiah)	Persentase
1	Dati II Madiun	923.968	101,11
2	Kabupaten Ngawi	823.111	96,08
3	Kabupaten Ponorogo	773.819	84,69
4	Kabupaten Pacitan	593.583	64,96
5	Kabupaten Magetan	895.037	97,95
Pendapatan perkapita SWP VIII		913.747	100

Sumber data : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1997a, Mei 2000

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa tingkat pendapatan perkapita tertinggi dicapai Dati II Madiun Rp 923.968 atau 101,11%, Kabupaten Ngawi Rp 823.111 atau 96,08%, Kabupaten Ponorogo Rp 773.819 atau 84,69%, Kabupaten Pacitan Rp 593.583 atau 64,96% dan Kabupaten Magetan Rp 895.037 atau 97,95%. Hal yang perlu diperhatikan adalah masih bervariasinya tingkat pendapatan perkapita pada sub-sub SWP VIII

sehingga kesejahteraan masyarakat pada sub-sub SWP VIII juga masih bervariasi.

4.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator pembangunan regional serta menjadi tolok ukur bagi tingkat kesejahteraan suatu daerah, karena menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi yang turut berproduksi dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto sub-sub SWP VIII terlihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di SWP VIII Madiun Tahun 1996

No	SSWP	Jumlah (rupiah)	Persentase
1	Dati II Madiun	860.676,48	27,17
2	Kabupaten Ngawi	694.220,28	21,91
3	Kabupaten Ponorogo	677.643	21,39
4	Kabupaten Pacitan	312.741,84	9,87
5	Kabupaten Magetan	623.093,31	19,67
Total		3.429.125,26	100

Sumber data : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur, 1997a, Mei 2000

Berdasarkan tabel 7 Produk Domestik Regional Bruto sub-sub SWP VIII tahun 1996 atas dasar harga konstan 1993 Dati II Madiun (Kabupaten dan Kotamadya) tertinggi yaitu sebesar Rp 860.676,48 atau 27,17%, Kabupaten Ngawi sebesar Rp 694.220,28 atau 21,91%, Kabupaten Ponorogo Rp 677.643 atau 21,39%, Kabupaten Pacitan Rp 312.741,84 atau 9,87% dan Kabupaten Magetan Rp 623.093,31 atau 19,67%.

Produk Domestik Regional Bruto sub-sub SWP VIII menunjukkan adanya suatu kegiatan pembangunan daerah yang berhasil, tetapi dalam hal

distribusinya perlu ada suatu usaha yang harus dilakukan sehingga distribusi yang terjadi dapat seimbang. Hal tersebut dapat tercapai dengan semakin meningkatkan mobilitas barang dan jasa melalui peningkatan interaksi baik secara sektoral, antar pelaku ekonomi dan antar SSWP VIII dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

4.1.3.3 Pertumbuhan PDRB di SWP VIII Madiun

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di SWP VIII Madiun dari tahun 1993-1996 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 di SWP VIII Madiun pada Tahun 1993-1996

Tahun	PDRB (rupiah)	Kenaikan (rupiah)	Persentase
1993	2.612.904,36	-	-
1994	2.804.754,94	191.850,58	7,34
1995	3.082.188,19	277.433,25	9,89
1996	3.429.125,26	346.937,07	11,26
Pertumbuhan rata-rata			9,49

Sumber : Kantor statistik Propinsi Jawa Timur, 1997c, Mei 2000

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1993 pada kurun waktu 1993-1996 secara absolut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9,49% pertahun, ini berarti sesuai yang diharapkan tanpa mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1996 yaitu mencapai 11,26%, laju pertumbuhan ini lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 9,89%. Pertumbuhan terendah sebesar 7,34% terjadi pada tahun 1994. Hal ini terjadi sebagai akibat pertumbuhan sosial ekonomi Indonesia sudah mencapai kestabilan.

Tabel 9. Sumbangan Sektor Pendukung PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1993 di SWP VIII Madiun Tahun 1996

Sektor	PDRB (rupiah)	Persentase
Primer	1.174.672	34,36
Sekunder	660.323,46	19,25
Tersier	1.056.396,84	30,80
Jasa	537.732,88	1,57
Total	3.429.125,26	100

Sumber : Lampiran 3, diolah Mei 2000

4.2 Analisis Data

4.2.1 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi antar SWP di SWP VIII Madiun

SWP VIII Madiun dalam kebijaksanaan perwilayahan dibagi menjadi enam SSWP, yaitu : Kotamadya Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan.

Pergeseran total pertumbuhan ekonomi antar SWP (PTj) dari tahun 1993-1996 dapat diketahui melalui penjumlahan persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen Pertumbuhan Proporsional (PPij) dan persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPWij). Kriteria pertumbuhannya adalah apabila $PTj > 0$ maka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mengalami kemajuan, sedangkan apabila $PTj < 0$ maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah lamban. Hasil perhitungan PTj dapat dilihat pada tabel 10.

Berdasarkan tabel 10 pergeseran total pertumbuhan ekonomi Dati II Madiun 40,44% (maju), Kabupaten Ngawi -7,63% (lamban), Kabupaten Ponorogo -9,98% (lamban), Kabupaten Pacitan -14,28 (lamban), dan Kabupaten Magetan -13,87% (lamban).

Tabel 10. Hasil Perhitungan Pergeseran Total Pertumbuhan Ekonomi di SWP VIII Madiun Tahun 1993-1996

SSWP	PTj	Persentase	Keterangan
Dati II Madiun	200.962,681	40,44	Maju
Kabupaten Ngawi	-42.967,458	-7,63	Lamban
Kabupaten Ponorogo	-54.766,239	-9,98	Lamban
Kabupaten Pacitan	-37.954,383	-20,26	Lamban
Kabupaten Magetan	-72.733,654	-13,87	Lamban

Sumber : Lampiran 13, diolah Mei 2000

Berdasarkan hasil tersebut berarti di SWP VIII daerah yang maju adalah Dati II Madiun, sedangkan daerah yang lamban meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Magetan dengan persentase yang berbeda-beda.

Adanya daerah maju dan daerah yang lamban ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Tetapi yang lebih utama adalah sumbangan masing-masing sektor terhadap pertumbuhan PDRB untuk tiap SSWP.

4.2.2 Tingkat Kesenjangan Pendapatan antar SWP di SWP VIII Madiun

Peranan pusat SWP bagi pengembangan wilayah dapat ditunjukkan dengan perkembangan pendapatan kotamadya atau kabupaten. Peranan pusat pertumbuhan SWP bagi perkembangan wilayah itu dapat ditunjukkan dengan ada tidaknya kesenjangan pendapatan pada SSWP tersebut.

Kesenjangan pendapatan merupakan salah satu indikator tentang efektif tidaknya pusat pertumbuhan dalam mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan daerah sub-nya. Keadaan tingkat kesenjangan antar SWP di SWP VIII Madiun dapat dilihat pada tabel 11.

Seberapa besar tingkat kesenjangan suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Williamsonya. Kriterianya semakin mendekati 0 berarti kesenjangan kecil, sebaliknya semakin mendekati 1 berarti kesenjangan besar dan apabila Vw SWP VIII Madiun lebih besar daripada Vw Jawa Timur berarti kesenjangan di SWP VIII Madiun lebih besar dari pada Jawa Timur dan sebaliknya.

Tabel 11. Hasil Perhitungan Indeks Williamson per SSWP di SWP VIII Madiun Tahun 1996

No	SSWP	Indeks Williamson	Keterangan
1	Dati II Madiun	0,68880	Besar
2	Kabupaten Magetan	0,69532	Besar
3	Kabupaten Ngawi	0,61171	Besar
4	Kabupaten Pacitan	0,59018	Besar
5	Kabupaten Ponorogo	0,58487	Besar
6	Jawa Timur (pembanding)	0,13712	Kecil

Sumber : Lampiran 14, diolah Mei 2000

Berdasarkan tabel 11 hasil perhitungan Indeks Williamson wilayah Madiun (termasuk Kabupaten dan Kotamadya) sebesar 0,6888; Kabupaten Magetan Vw sebesar 0,69532; Kabupaten Ngawi Vw sebesar 0,61171; Kabupaten Pacitan sebesar 0,59018; dan Kabupaten Ponorogo Vw sebesar 0,58487. Jadi rata-rata tingkat kesenjangan pendapatan SWP VIII Madiun sebesar 0,63418 termasuk besar dibandingkan dengan tingkat kesenjangan Jawa Timur sebesar 0,13712.

Adanya tingkat kesenjangan yang besar dalam perhitungan analisis di setiap wilayah pertumbuhan disebabkan perbedaan masing-masing wilayah dalam mengambil keputusan kebijaksanaan pembangunan, adanya *doube accounting* (seperti para pencari kerja dimana tempat tinggalnya di wilayah A mencari kerja di wilayah B, sehingga ada dua perhitungan pendapatan, yaitu di daerah A dan di daerah B), letak geografis masing-masing wilayah

dalam mendukung peningkatan pendapatan (seperti di daerah pantai, daerah yang tanahnya subur), serta jarak antar wilayah cukup jauh sehingga memperlemah interaksi antar wilayah tersebut yang berakibat pada kurang efektifnya proses mempengaruhi dan terpengaruhi.

Adanya pusat-pusat pertumbuhan, akan memberikan peranan yang lebih besar dalam pengembangan wilayah sekitar, meskipun intensitas penyebaran yang diterima oleh daerah tersebut berbeda-beda. *Spread effects* dari pusat pengembangan hanya menjangkau sampai batas tertentu. Ada sebagian daerah yang tidak bisa menikmati *spread effects* dari pusat pengembangan karena jarak yang jauh dari pusat pertumbuhan.

4.2.5 Implementasi Pengembangan Perwilayahan di SWP VIII Madiun

Dilihat dari hasil perhitungan pergeseran total pertumbuhan ekonomi di Dati II Madiun mencapai 40,44% dikatakan maju dibandingkan daerah lainnya. Selain itu hasil perhitungan Indeks Williamson di SWP VIII Madiun rata-rata 0,63418, berarti tingkat kesenjangan antar wilayah di SWP VIII Madiun termasuk besar. Oleh karena itu prioritas pembangunan di daerah Madiun sebagai pusat pertumbuhan SWP VIII Madiun dan hinterlandnya, yaitu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa (khususnya pendidikan). Dilihat dari peranan sektoral tersebut terhadap PDRB Kotamadya Madiun tahun 1996, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 30,35% (terutama industri barang dari logam sebesar 20,05%), perdagangan hotel dan restoran 16,51% serta sektor jasa sebesar 14,82%. Dari data tersebut Kotamadya Madiun sebagai bagian dari daerah Madiun menekankan pada sektor industri pengolahan. Melihat prospek sektor ini membuka peluang bagi investor untuk lebih berpacu mengembangkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah

di dalam mendayagunakan potensi wilayah yang merupakan modal pembangunan (Kantor Statistik Kotamadya Madiun: 1997a)

Pembangunan daerah Madiun perlu dipacu dengan memprioritaskan sektor industri pengolahan. Pemerintah Daerah Madiun telah membuat kawasan industri yang merupakan peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya, yang berlokasi di Kec.Kartoharjo Desa Tawangrejo dan Kel.Sukosari serta Kec.Mangunharjo Desa Patihan. Selain itu perlu dikembangkan industri-industri kecil di beberapa daerah sekitar, seperti industri kulit di Magetan, industri kripik tempe di Ngawi, dan industri peralatan seni (khususnya reog) di Ponorogo yang menjadi ciri khusus bagi daerah tersebut. Ini juga membuka peluang bagi para investor, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi SWP VIII.

Peranan bidang pendidikan pada sektor jasa masih perlu ditingkatkan peranannya terhadap PDRB, karena sampai saat ini belum ada Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Madiun. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan wilayah Madiun sebagai : KOTA GADIS (Perdagangan, Pendidikan dan Industri) agar wilayah Madiun dapat mencapai sasaran pertumbuhan yang memadai (tingkat kemakmuran yang merata).

Faktor lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi SWP VIII menentukan kebijaksanaan dan strategi secara makro yaitu mewujudkan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan melalui efek tetesan (*trickle down effects*). Peranan pusat pertumbuhan sebagai *spread effects* sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah sekitar.

Perencanaan struktur wilayah akan diintegrasikan antara konsep-konsep dasar yang menjamin perencanaan sosial ekonomi dan secara simultan pengembangan wilayah SWP VIII Madiun akan mendukung berdirinya suatu sistem pendukung yang saling menguntungkan antara

daerah Madiun dan daerah-daerah lainnya. Dalam rangka pengembangan tata ruang SWP VIII Madiun, maka arah pengembangan tersebut sangat ditentukan oleh sistem transportasi yang meliputi sistem jaringan dan angkutan, sebab pengembangan transportasi dalam skala regional merupakan suatu tindakan *economical bias*, dalam arti peningkatan transportasi perhubungan dengan tujuan peningkatan ekonomi suatu wilayah.

Penyediaan sarana dan prasarana eksternal sangat dibutuhkan untuk upaya tersebut. Sarana dan prasarana pendukung tersebut adalah sistem transportasi darat. Dalam rangka menjamin proses perkembangan wilayah SWP VIII Madiun secara keseluruhan dalam kesatuan perkembangan yang dinamis, maka pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem perhubungan regional SWP Madiun perlu dikembangkan dan dimantapkan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam secara penuh bagi perkembangan ekonomi wilayah atau daerah dapat tercapai. Oleh karena itu pengembangan transportasi diarahkan pada daerah terbelakang dan daerah terpencil tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

Dengan dibangunnya jaringan jalan yang menghubungkan antar kota dalam kondisi yang baik, nampaknya masih belum cukup sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi wilayah di daerah-daerah tingkat II se-SWP Madiun. Persoalan yang mendasar adalah belum terdapatnya pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan antar kota atau antar kecamatan. Pembangunan jaringan jalan tersebut disertai dengan peningkatan kualitas pengaspalan serta pembuatan jalan baru yang menghubungkan antar kecamatan yang ada di SWP Madiun terutama di kabupaten Pacitan.

Berkaitan dengan tujuan penyediaan jaringan jalan lintas, maka penentuan pola jaringan jalan di wilayah SWP Madiun akan memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. jaringan jalan yang direncanakan harus mampu mencerminkan hubungan antar wilayah yang akan dikembangkan;
2. berdasarkan kondisi existing dan rencana jaringan yang ada (aspek supply);
3. adanya kendala kondisi fisik alami terutama dengan keberadaan sungai-sungai, sehingga penentuan jalan diusahakan sedapat mungkin menekan biaya dan menghindari kesulitan dalam konstruksi pembangunannya.

Sesuai dengan struktur dan pola rencana tata ruang wilayah SWP Madiun maka jaringan yang perlu mendapat prioritas pengembangan meliputi (Kantor Bappeda Jawa Timur, 1990b, Mei 2000), (lihat lampiran 15):

1. jaringan jalan primer sebagai penghubung kota orde satu dengan kota orde dua diwilayahnya meliputi :
 - jalur Surabaya - Mojokerto - Madiun/Ngawi
 - jalur Surabaya - Mojokerto - Madiun/Magetan
 - jalur Surabaya - Mojokerto - Madiun/Ponorogo
2. jaringan jalan sekunder sebagai penghubung kota orde ketiga atau orde kedua meliputi :
 - jalur Ponorogo - Pacitan
 - jalur Ponorogo - Trenggalek
 - jalur Pacitan - Trenggalek - Tulungagung/Blitar
 - jalur Madiun - Ponorogo
 - jalur Madiun - Magetan
 - jalur Madiun - Ngawi

4.3 Pembahasan

Proses perkembangan daerah terjadi akibat interaksi ruang berdasarkan prinsip aglomerasi atau skala ekonomi menuju efisiensi. Ekonomi pusat pertumbuhan atau ekonomi kota besar akan menjadi pusat kegiatan daerahnya sendiri dan pusat kegiatan dari kota yang lebih kecil. Hal tersebut berarti kota yang lebih kecil sangat tergantung pada tersedianya kegiatan yang ada pada pusat pertumbuhan, sesuai dengan teori tempat sentral.

Teori pusat pertumbuhan terdapat *leading sector* atau sektor yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan terjadinya polarisasi dari sektor-sektor lainnya yang saling bergantung. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam keuntungan aglomerasi secara implisit akan menimbulkan polarisasi geografik dimana terjadi aliran sumber-sumber daya dan konsentrasi ekonomi pada pusat yang jumlahnya terbatas sebagai akibat dari kualitas *propulsif* pusat pertumbuhan yang dinamis.

SWP VIII Madiun dalam kebijaksanaan perwilayahan terbagi menjadi enam SSWP. Dasar pembagian tersebut memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang terbagi menjadi pusat pertumbuhan dan daerah belakang. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan adalah daerah yang mempunyai potensi lebih dan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh daerah belakang. Hal ini sesuai pendapat Myrdall (dalam Nuryasman, 1996:243) bahwa tempat-tempat yang akan menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian, sehingga daerah tersebut memiliki keuntungan komparatif dibandingkan daerah lainnya.

Pengklasifikasian daerah kedalam dua kelompok yaitu daerah yang mempunyai pola pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan rendah untuk

menilai sejauh mana ketimpangan pembangunan terjadi, terutama pembagian sub-sub region di SWP VIII Madiun selama tahun 1993-1996. Daerah yang memiliki pola pertumbuhan rendah serta mengalami perkembangan, tetapi perkembangannya tidak mencapai taraf yang dapat dicapai oleh daerah yang maju. Di SWP VIII yang termasuk pertumbuhan ekonominya maju yaitu daerah Madiun, sehingga dijadikan pusat pertumbuhan bagi wilayah lainnya.

Sektor yang paling besar pengaruhnya dalam pengklasifikasian pola pertumbuhan daerah adalah sektor industri yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar pada suatu daerah. Selain itu kawasan industri akan menyebabkan timbulnya kebutuhan sektor-sektor lain yang mendukung. Timbulnya kawasan industri yang terpusat akan menyebabkan ketidakseimbangan pola pertumbuhan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (1982:66-67) bahwa sektor perlu lebih diratakan ke berbagai daerah untuk mencapai pola pertumbuhan yang seimbang atau dapat menimbulkan *spread effects* bagi pertumbuhan SWP VIII Madiun. Sektor pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air minum, angkutan dan komunikasi serta bangunan dan konstruksi dan jasa memberikan sumbangan negatif, berarti sektor itu menimbulkan *backwash effects* bagi pertumbuhan SWP VIII Madiun.

Ketidakseimbangan dalam pola pertumbuhan pada sub-sub region karena keunggulan komparatif yang terjadi pada masing-masing daerah berbeda, sehingga tidak semua daerah antar SWP mempunyai pola pertumbuhan yang tinggi semua. Demikian pula yang terjadi pada SWP yang lain mempunyai pola pertumbuhan rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Richardson (1991:39) bahwa keunggulan komparatif sektor-sektor perekonomian yang dimiliki suatu daerah akan menyebabkan suatu daerah akan tumbuh lebih cepat. Pendapat Glasson (1990:94) mengenai terjadinya

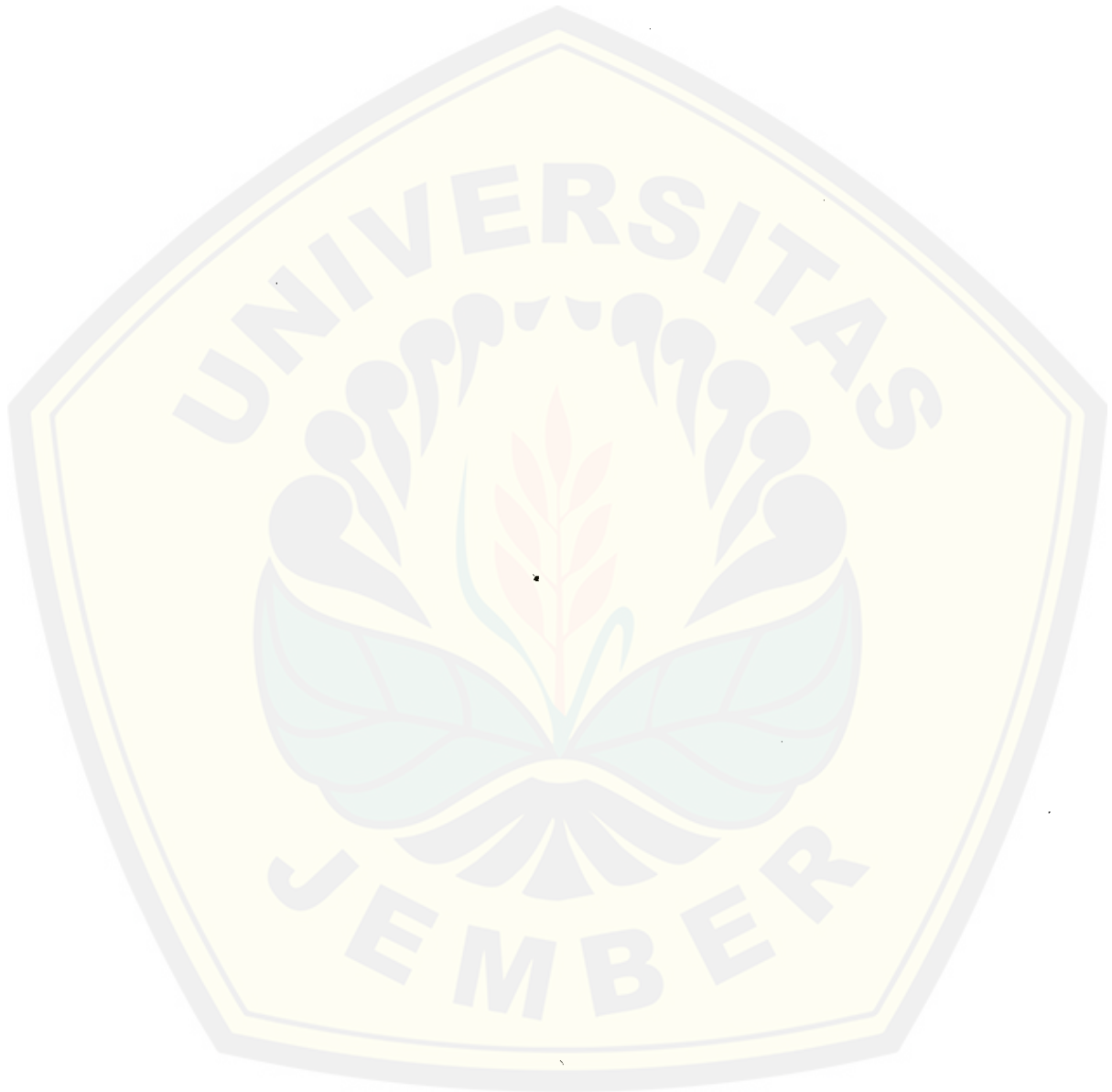
perbedaan pola pertumbuhan disebabkan pola struktur yang berbeda antar daerah yang satu dengan yang lainnya.

Pengembangan wilayah SWP VIII Madiun secara konvensional cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Asumsi dasar pengembangan wilayah SWP VIII adalah proses pembangunan berlangsung dalam suatu ekuilibrium matriks lokasi yang terdiri dari pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) dan daerah penyangga (*hinterland*). Di dalam matriks lokasi industri-industri maju (*leading industries*) menciptakan kaitan ke depan dan ke belakang dalam sistem ekonomi menciptakan aglomerasi ekonomi yang mendorong *locational efficiency* pada pusat pertumbuhan. Hubungan input output dari serangkaian industri berteknologi tinggi yang bersifat propulsif dan elastis dengan industri-industri yang lebih sederhana (*lagging industries*) menimbulkan proses difusi dan efek tebar yang akan mempercepat proses industrialisasi, sehingga kesenjangan antar daerah dapat diatasi.

Implementasi pembangunan di SWP VIII diarahkan pada permasalahan ketidakseimbangan pola pertumbuhan dan kesenjangan antar wilayah, sehingga diprioritaskan pada sektor industri pengolahan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya, yang berlokasi di Kec.Kartoharjo Desa Tawangrejo dan Kel.Sukosari serta Kec.Mangunharjo Desa Patihan. Dengan demikian antar daerah akan berpacu dalam mendayagunakan potensi wilayah sebagai modal pembangunan. Hal ini sesuai tujuan RUTR Wilayah SWP Madiun (Kantor Bappeda Jawa Timur, 1990b:167) yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk usaha industri.

Selain itu untuk menghindari terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah dan perbedaan pola pertumbuhan yang disebabkan struktur

ekonomi yang berbeda antar daerah adalah dibangun sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan dan transportasi yang menghubungkan antar daerah yang pertumbuhannya masih lamban.



V.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Selama kurun waktu 1993-1996 hasil perhitungan pergeseran total pertumbuhan ekonomi Dati II Madiun sebesar 40,44% (daerah maju), Kabupaten Ngawi -7,63% (lamban), Kabupaten Ponorogo -9,98% (lamban), Kabupaten Magetan -13,87% (lamban) dan Kabupaten Pacitan -20,26% (lamban)
2. rata-rata tingkat kesenjangan pendapatan Wilayah SWP VIII Madiun 0,63417 tergolong besar dibandingkan tingkat kesenjangan Jawa Timur sebesar 0,13712. Tingkat kesenjangan terkecil pada kabupaten Ponorogo sebesar 0,58487 dan paling besar pada kabupaten Magetan sebesar 0,69532;
3. Implementasi pembangunan di SWP VIII Madiun sangat diperlukan peranan pusat pertumbuhan sebagai *spread effects* bagi wilayah sekitar dengan mengembangkan sektor industri untuk membuka peluang bagi para investor dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur berupa jalan dan transportasi yang dapat memperkecil kesenjangan perkembangan antar daerah. Pengembangan transportasi diarahkan pada daerah terbelakang dan terpencil, tetapi memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama kabupaten Pacitan untuk menghubungkan antar kecamatan.

5.2 Saran-saran

Untuk penyempurnaan implementasi permasalahan perwilayahan pembangunan di SWP VIII Madiun, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah :

1. dalam rangka mengurangi tekanan migrasi penduduk keluar daerah, mencegah terjadinya pemusatan di kota besar, memperkecil disparitas antar daerah dan memperkuat interdependensi antar kota-kota di daerah-daerah tingkat II se-SWP VIII Madiun dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pengembangan wilayah dan keseimbangan dalam penanaman modal, terutama untuk mendorong adanya perimbangan dalam kesempatan kerja, biaya hidup dan pendapatan antar kota dan daerah sehingga mendorong perkembangan kota-kota menengah, kecil dan daerah pedesaan disekitarnya (hinterland);
2. keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan sehingga pembangunan sektoral di daerah benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas dari masing-masing daerahnya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan tersebut perlu lebih diarahkan pada peningkatan hubungan aliran pendapatan antar kota dan daerah pedesaan. Sehingga tidak terjadi kesenjangan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief,Sritua.1998.*Pembangunan dan Ekonomi Indonesia:Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi*.Jakarta:Zaman
- Budiharsono,S.1989.*Teori,Model Perencanaan dan Penerapannya*. Jakarta. Pau-Ekonomi-UI. Kampus baru UI Depok
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *GBHN, Tap No.IV/MPR/1999*. 1999-2004. Jombang :Lintas Media
- Glasson,John.1990.*Pengantar Perencanaan Regional*.Terjemahan oleh Paul Sitohang.Jakarta.LPFE UI
- Hadjisaroso,Poernomosidi.1990.*Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta.Departemen Pekerjaan Umum
- Irawan,M dan Soeparmoko. 1995. *Ekonomika Pembangunan*.Yogyakarta. BPFE
- Jhingan,M.C. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Kantor Bappeda Propinsi Jawa Timur.1990a.*Tata Ruang Jawa Timur Tahun 2008*.Surabaya
- _____.1990b.*Rencana Tata Ruang Wilayah Satuan Pembangunan Madiun dan Sekitarnya*.Surabaya
- _____.1997.*PDRB SWP se-Jawa Timur Tahun 1996*.Kerjasama Kantor Statistik dan Bappeda Propinsi Jawa Timur.Surabaya
- Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur.1997a.*Jawa Timur dalam Angka*. Surabaya
- _____.1997b.*Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kotamadya se-Jawa Timur 1993-1996*.Surabaya

- _____.1997c.*Produk Domestik Regional Bruto Tahun 1993-1996*. Surabaya.
- Kantor Statistik Kotamadya Madiun.1997a.*Kotamadya Madiun dalam Angka*.Madiun
- _____.1997b.*Kabupaten Madiun dalam Angka*.Madiun
- _____.1997c.*Kabupaten Magetan dalam Angka*.Madiun
- _____.1997d.*Kabupaten Ngawi dalam Angka*.Madiun
- _____.1997e.*Kabupaten Ponorogo dalam Angka*.Madiun
- _____.1997f.*Kabupaten Pacitan dalam Angka*.Madiun
- Kristanto,H Roedy.1998.*Analisis Pertumbuhan antar Wilayah di Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Dati II Jember*.Skripsi.Universitas Jember.Tidak dipublikasikan
- Nuryasman.1996.Pengembangan Konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia. *dalam Media Ekonomi* Vol.3,No.3. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.Jakarta
- Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.1998.*Repelitada VI Dati I Jawa Timur 1984/1985-1988/1989*.Surabaya
- Putra,S Rubi.1997.*Pengembangan Sektor Ekonomi Guna Peningkatan Sumbangan Terhadap PDRB Kotamadya Dati II Pasuruan*.Skripsi.Universitas Jember.Tidak dipublikasikan
- Richardson,Harry W. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan oleh Paul Sitohang.Jakarta.LPFE UI
- Sukirno,Sadono. 1982. *Ekonomi Pembangunan:Proses, Masalah, dan Dasar-dasar Kebijakan*.Jakarta.LPFE UI
- Sumodiningrat,Gunawan.1996.*Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan*